

**MEMBANGUN JEMBATAN TEOLOGI  
ANTARA INTEGRASI DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA  
(SATUKAJJAN TENTANG PERSPEKTIF GEREJAWI DALAM POLITIK PAPUA)**

**TESIS**



**OLEH**

**PIETER KEITY LEWIER**

**51120006**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
JOGYAKARTA, 2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

“MEMBANGUN JEMBATAN TEOLOGI

ANTARA INTEGRASI DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA”

*(Suatu Kajian tentang Perspektif Gerejawi dalam Politik Papua)*

Telah diajukan dan dipertahankan:

Pieter Keity Lewier

NIM : 51120006

Dalam ujian tesis Program Studi S-2 Ilmu Teologi  
Minat Studi Teologi Praktis  
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana  
Dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Sains Teologi pada tanggal 27 Februari 2015

Pembimbing I

(Pdt. Dr. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum.)

Pembimbing II

(Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th.)

Penguji

1. Pdt. Dr. Josef M.N. Hehanussa, M.Th.

2. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th.

3. Pdt. Dr. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum

Tandatangan

1.

2.

3.

Disahkan oleh:

Kaprodi Pascasarjana (S-2) Ilmu Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta



Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Gereja Kristen Injili di Tanah Papua telah melewati suatu sejarah cukup panjang dalam perjalanan mendampingi dan melayani umat di atas tanah dan negeri Papua. Bersamaan dengan sekalian umat Papua dari masa ke masa gereja ini telah berjalan beriringan melewati fase demi fase sejarah yang membesarkannya, termasuk di dalamnya suatu usaha yang menerjang dinamika politik Papua yang tak berkesudahan. Tulisan ini berusaha mengungkapkan segelintir perangnya gereja yang secara signifikan telah membentuk Papua sebagai suatu wilayah paling timur Indonesia kini. Suatu peran dalam perspektif dan praksis pelayanan GKI di Tanah Papua, yang meskipun tidak selalu sempurna namun secara optimis akan terus menjemput harapan-harapan perubahan bagi Tanah Papua yang lebih baik, Tanah Papua yang beradil, damai dan sejahtera. Sebagaimana gereja ini sebagai bagian dari aliran reformasi selalu berbangga dengan sembojannya *aeclesia reformata, ecclesia semper reformanda*, gereja yang telah direformasi adalah gereja yang terus menerus diperbaharui.

Oleh karena itu, sungguhlah tulisan ini hadir jauh dari sempurna, maka penulis tentu membutuhkan kritik, saran yang konstruktif bagi kesempurnaan tulisan ini. Demikianlah beberapa pihak merupakan penolong yang telah membantunya sehingga tulisan ini dapat terselesaikan, maka bersamaini penulis menghaturkan terima-kasih yang mendalam kepada:

1. Dosen Pembimbing I, Pdt. Dr. Wahyu Satria Wibowo, M. Hum. dan Pembimbing II Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M. Th. yang setia dalam pembimbingan serta kontribusinya bagi penulis tesis ini. Dan Bapak Pdt. Dr. Jozef Hehanusa, M. Th. sebagai dosen penguji.
2. Sinode GKI di Tanah Papua atas kesempatan study ini. Pdt. A. Yoku, STh, selaku Ketua Sinode serta sekaligus sebagai narasumber dalam penulisan ini dan Ibu Pdt. Yemima Krey, STh sebagai Wakil Ketua Sinode yang membidangi Pendidikan yang berjuang, serta mengunjung dan mendoakan kami dalam study ini.

3. KetuaKlasis GKI JayapuraPdt.WillemItaar,S.Th.M.Hum yang merokomendirsertamembantu kami untuk study. Arahan-arahanyaselalumemberimotivasidanpenyemangatbagipenulis.
4. Istriterkasih, Pdt. PorniIrnaSuryaniSedu,S.Th. yang telahmendukungdanmendorongpenulissenantiasaa, dalamdoadansemangatsehinggapenulismampumenuntaskanperjalanan study nan panjangini.
5. Anak-anakku yang kucintai, Claudya, Theo, Claus, danGloria., yang selalumjadi penyemangatbagisemangatjuangpenulismenyelesaikan study. Saudarabasudarakandung yang selalumendoakanku, AdikBungsukuKristianLewierbersamaIstridananak-anaknyajugaponakankuSellyna Aurora Rahayaan,M.Simerekapemberisemangatdengandiskusi-diskusi yang menarikselamaada di Jogjakarta.
6. RektorUniversitasKristen Duta Wacana (UKDW)danCivitasakademika UKDW Program PascaSarjanaTeologi.(TeologiPraktis), paradosen yang mengajarmembuat kami terkagum-kagumdenganilmu yang dibagi. IbuTyasstaf Tata Usaha yang selalumembangunkomunikasidengan kami.
7. Rekan-rekanPendeta yang telahbersama-samamenjalanisuatu proses belajartakkunjunglalahini. Ada candadantawa, harapandancitacitadalampembaharuanpelayanankedepan di ladang Tuhan GKI-TP.
8. MajelisJemaat, KetuadanKoordinatormajeliswijkdaneluruhanggotaJemaat GKI PengharapanJayapuradenganbantuanadanadanKeluarga-keluarga yang sayasebutKel.Y.Hutubessy, Kel.Edu Fonataba, Kel A. Asmuruf, Kel J. Kaunang, KelRumaropendanKelYanteo-Aragae, IbuSitompul, Kel dr. YaohanesArfayan, yang membantu kami dalamfinansial. JugaBapak Jansen BanydanBpkAgusAdile di Merauke yang jugaikutmembantudanadalampenyeseaiantesisini.
9. Pdt. Dr.S.Sumihe,M.Th, danPdt C. Ruhulesin,M.Th yang jugamemberiandildalam proses study.
10. PemerintahPropinsi Papua melaluiDepartemenPendidikandanKebudayaandenganbantuanadananya.

Kiranya Kristus, sang Guru agung membalas segala kebaikan dan pertolongan saudara-saudara sekalian. Amin.

Yogyakarta, 01 Maret 2015.

Penulis.

## DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi .....	iv
Abstraksi .....	vi
Lembaran Pengesahan Integritas .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang .....	1
B Rumusan Masalah .....	10
C Batasan Masalah .....	10
D Tujuan Penelitian .....	10
E Manfaat Penelitian .....	10
F Judul .....	11
G Metode Penelitian .....	11
1. Lokasi Penelitian .....	11
2. Tipe Penelitian .....	11
3. Tehnik Penelitian .....	11
a. Tehnik Wawancara .....	11
b. Tehnik Study Dokumen .....	11
4. Jenis Data .....	12
H Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
A Pengantar .....	13
B Profil Papua .....	14
C Profil Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua .....	16
1. Keorganisasian .....	16
2. Teologi Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua .....	19
D Laporan Penelitian .....	25
1. Deskripsi Wawancara .....	26
2. Deskripsi data wawancara .....	26
2.1. Pandangan Gereja dalam pelaksanaan Pepera .....	26
2.2. Cara Mengatasi Warga Jemaat yang tidak setuju atau kecewa Irian Barat masuk ke pangkuan RI .....	28
2.3. Tanggung Jawab Gereja Dalam Politik .....	29
2.4. Sikap Terhadap Politik Pembebasan Papua yang menghendaki kemerdekaan	

.....	31
2.5. Pandangan Gereja Tentang Otonomi Khusus dan Implementasinya.....	34
2.6. Anggapan sebagian orang yang mengatakan Otsus gagal dan Bagaimana Gereja menjembatannya	36
.....	
3. Deskripsi Data Dokumen .....	37
3.1. Sidang Sinode III GKI - TP Pada Tahun 1962 .....	37
3.2. Pernyataan Sikap 10 Maret 1964 .....	39
3.3. Pesan Sidang Sinode XIV Sorong 2000 .....	39
3.4. Pesan Sidone XV Wamena .....	42
E Kesimpulan .....	43
<b>BAB III TEOLOGI PEMBEBASAN MENURUT GUSTAVO GUTIERREZ DAN ALOYSIUS PIERIS .....</b>	<b>46</b>
A Pengantar Teoritik .....	46
B Biografi dan Karya Serta Pemikiran Gustavo Gutierrez .....	50
1. Biografi Gustavo Gutierrez .....	50
2. Karya-karya Gustavo Gutierrez .....	52
3. Teologi Gustavo Gutierrez .....	53
C Biografi Karya dan Pemikiran Teolog Aloysius Pieris .....	60
1. Biografi Aloysius Pieris .....	60
2. Karya – karya Aloysius Pieris .....	62
3. Teologi Aloysius Pieris .....	64
3.1. Kembali Kepada Yesus .....	67
3.2. Merumuskan Satu Formula Baru Yang Sesuai Dengan Asia .....	68
D Korelasi Dan Perbedaan Antara Gustavo Gutierrez dan Pieris .....	69
E Kesimpulan .....	70
<b>BAB IV MEMBANGUN JEMBATAN TEOLOGI ANTARA INTEGRASI DAN OTSUS PAPUA.....</b>	<b>73</b>
A Pengantar .....	73
B Analisis Tentang Perspektif GKI Terhadap Integrasi Papua.....	75
C Analisis Perspektif Gereja Terhadap Implementasi Otsus Papua .....	83
D Teologi Pembebasan Gutierrez dan Pieris Sumbangsihnya Bagi Teologi Pembebasan Papua .....	86
E Refleksi Membangun Jembatan Teologi Antara Integrasi Dan Otonomi Khusus Papua .....	93
1. Berteologi Dari Praksis .....	96
2. Membangun Komunitas Basis Gereja .....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	102
B Saran dan Usul .....	105
Daftar Kepustakaan .....	108

#### ABSTRAC

*The Title of tesis is: "Building atheological bridge of integration and autonomy in Papua" with subtitles is "the study of the ecclesiastical perspective of politics in Papua" The research used qualitative of approach. The aim of the research describes the ecclesiastical perspective ( the church of Christian evangelical in land Papua ) about politics in papua and gives an idea about the conept of theology to the church of Christian evangelical in land Papua.The resultsis that this research givessignificant paradigm shifto theological Renewal, by using the praxis of the community base, that moving in the context of Papua.*

*The key words: The teology, integration, and special autonomy,Gustavo Gutierrez, A.Pieris, theologi libertation.*

#### ABSTRAKSI

Judultesisiniadalah : "MEMBANGUNJEMBATAN TEOLOGI ANTARA INTEGRASI DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA" dengan sub Juduladalah: "SatukajiantentangperspektifGerejawipadapolitik Papua" Jenispenelitian yang digunakanadalahpendekatankualitatif. DengantujuanyaitumendesripsikanprespektifGerejawi (Gereja Kristen Injili di Tanah Papua) tentangpolitik di Papua danmemberisumbanganpemikiranentangkonsepTeologiPolitikbagi GKI di Tanah Papua.Hasilpenilitiandiharapkanadapatmemberiperubahanparadigma yang

signifikanataupembaharuancaraberteologi, denganmengunakanpendekatan model teologidalampraksissertamembangun dialog-dialog praksisdalamkomunitas basis gereja yang bergerakkesuaidengankonteks Papua.

***Kata kunci :Jembatanteologi, IntegrasidanOtonomi Khusus,Gustavo Gutierrez,A.Pieris, Teologi pembebasan.***

### **LEMBARAN PENGESAHAN INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan di bawahini:

**Nama : Pieter KeityLewier.**

**N I M : 51120006**

Denganinisayamenyatakanbahwatesisdenganjudul: **“MEMBANGUN JEMBATAN TEOLOGI ANTARA INTEGRASI DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA”** ( **Suatkajian tentangperspektifGerejawidalam politik Papua** )adalahhasilkaryasaysendiri, dengancatatanreferensi yang diacuolehtesisidandisebutkandalamdaftarpustaka.

Jogyakarta, 01 Maret 2015

## LEMBARAN PENGESAHAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pieter KeityLewier.

N I M : 51120006

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul: “MEMBANGUN JEMBATAN TEOLOGI ANTARA INTEGRASI DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA” ( Suatu kajian tentang perspektif Gerejawi dalam politik Papua ) adalah hasil karya saya sendiri, dengan catatan referenrensi yang diacu oleh tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jogyakarta, 01 Maret 2015



*Pieter Keity Lewier*  
Pieter Keity Lewier.

#### ABSTRAC

*The Title of tesis is: "Building atheological bridge of integration and autonomy in Papua" with subtitles is "the study of the ecclesiastical perspective of politics in Papua" The research used qualitative of approach. The aim of the research describes the ecclesiastical perspective ( the church of Christian evangelical in land Papua ) about politics in papua and gives an idea about the conept of theology to the church of Christian evangelical in land Papua.The resultsis that this research givessignificant paradigm shifto theological Renewal, by using the praxis of the community base, that moving in the context of Papua.*

*The key words: The teology, integration, and special autonomy,Gustavo Gutierrez, A.Pieris, theologi libertation.*

#### ABSTRAKSI

Judultesisiniadalah : "MEMBANGUNJEMBATAN TEOLOGI ANTARA INTEGRASI DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA" dengan sub Juduladalah: "SatukajiantentangperspektifGerejawipadapolitik Papua" Jenispenelitian yang digunakanadalahpendekatankualitatif. DengantujuanyaitumendesripsikanprespektifGerejawi (Gereja Kristen Injili di Tanah Papua) tentangpolitik di Papua danmemberisumbanganpemikiranentangkonsepTeologiPolitikbagi GKI di Tanah Papua.Hasilpenilitiandiharapkanadapatmemberiperubahanparadigma yang

signifikanataupembaharuancaraberteologi, denganmengunakanpendekatan model teologidalampraksissertamembangun dialog-dialog praksisdalamkomunitas basis gereja yang bergerakkesuaidengankonteks Papua.

***Kata kunci :Jembatanteologi, IntegrasidanOtonomi Khusus,Gustavo Gutierrez,A.Pieris, Teologi pembebasan.***

### **LEMBARAN PENGESAHAN INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan di bawahini:

**Nama : Pieter KeityLewier.**

**N I M : 51120006**

Denganinisayamenyatakanbahwatesisdenganjudul: **“MEMBANGUN JEMBATAN TEOLOGI ANTARA INTEGRASI DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA”** ( **Suatkajian tentangperspektifGerejawidalam politik Papua** )adalahhasilkaryasaysendiri, dengancatatanreferensi yang diacuolehtesisidandisebutkandalamdaftarpustaka.

Jogyakarta, 01 Maret 2015

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dimata rakyat Papua proses integrasi Irian Jaya(sekarang Papua) melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 adalah cacat hukum dan melanggar prosedur internasional dalam melaksanakan suatu referendum.<sup>1</sup> Ketidaksahan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sistem yang digunakan dalam pelaksanaan PEPERA tidak sesuai dalam New York Agreement “*act of free choice*” dilakukan berdasarkan “*one man one vote*” tapi hal ini diubah kedalam sistim perwakilan sementara.<sup>2</sup> Oleh karena itu sejak awal integrasi Papua ke Republik Indonesia (RI), banyak kecaman dari rakyat Papua, seperti berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada tahun 1967, adalah bentuk perlawanansekaligus untuk menarik perhatian internasional terhadap proses PEPERA yang dinilai tidak benar.<sup>3</sup> Berbagai laporan menyatakan bahwa aksi protes di berbagai daerah merupakan tonggak kebangkitan sejarah nasionalisme Papua yang muncul dalam semangat perlawanan seperti gerakan OPM, pengunsian massal ke Papua New Nugini (PNG) pada tahun 1984, Proklamasi Malanesia Barat di Lapangan Mandala Jayapura (1988), dan penyanderaan Tim Peneliti Lorents di Mampunduma (1996). Perlawanan rakyat Papua memuncak pasca tumbangnya rezim Presiden Soeharto atau Orde Baru pada 12 Mei 1998, di tandai dengan berbagai aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di hampir semua daerah Papua. Aksi ini disikapi oleh Pemerintah pusat dengan diadakanya dialog Nasional pada tanggal 26 Februari 1999.<sup>4</sup> Dialog tersebut dimanfaatkan oleh orang Papua (Tim 100) dihadapan Presiden RI Bapak B J Habibie, orang Papua menyatakan diri keluar dari Negara

---

<sup>1</sup>John Rumbiak *Ketika Ideologi sebuah Bangsa tiba di Persimpangan “Potret Hak Asasi Manusia di Papua “meliterisme,kekerasan dan impunitas””* (Jogyakarta, 2003) h 67

<sup>2</sup>Hikmahanto Juwana Artikel, “status Yuridis PEPERA Irianjaya dalam perspektif hukum International di undo di [http : underlaw tripod com/status yuridis penentuan pepera dalam hi htm](http://underlaw.tripod.com/status_yuridis_penentuan_pepera_dalam_hi.htm)

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup>John Rumbiak, *Ketika ideologi...*h 208

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasca Dialog Nasional, Rakyat Papua melakukan konsolidasi dengan melahirkan beberapa gerakan aspirasi politik Papua.

Pertama adanya deklarasi 12 November 1999, yang berlangsung di kediaman Pemimpin Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Bapak Theys Hiyo Eluay, yang dihadiri sekitar 5000 orang Papua, isi deklarasi adalah seruan pengibaran bendera Papua (Bintang Kejora) pada tanggal 1 Desember 1999.<sup>5</sup> Menyikapi seruan pengibaran bendera Papua, maka Tim Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI) memperkarsai pertemuan terpadu yang dihadiri oleh Lembaga Adat, Tim 100, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, dan perwakilan Mahasiswa serta Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Hasil pertemuan memberi dukungan dan meminta untuk diatur dalam suatu acara protokoler yang baik, mulai dari peribadatannya dan upacara bendera. Pertemuan juga telah merumuskan isi tuntutan politik salah satunya ialah menuntut agar Pemerintah Indonesia segera mengakui hak kedaulatan politik rakyat Papua Barat yang pernah dinyatakan pada tanggal 1 Desember 1961, yang dibacakan dalam moment perayaan tersebut.<sup>6</sup>

Kedua lahirnya musyawarah besar (MUBES) Papua pada tanggal 23 – 26 Februari 2000, dan Kongres II Papua pada tanggal 21 Mei – 04 Juni 2000. Dalam MUBES Papua Pelurusan sejarah adalah topik yang paling dominan dibicarakan dengan unsur-unsur pembahasan yaitu perlunya evaluasi terhadap proses integrasi Papua ke dalam RI, perlu adanya penilaian secara khusus terhadap PEPERA 1969, MUBES telah menghasilkan beberapa ketetapan di antaranya Tap No VII/MUBES-PAPUA/2000 Pembentukan Panel Dewan Papua sebagai kendaran politik Papua sehingga terbentuklah Presidium Dewan Papua (PDP),<sup>7</sup> maksud pembentukan PDP untuk menentukan pimpinan gerakan aspirasi merdeka (GERASEM) di masa mendatang. Sedangkan Kongres II Papua di Tahun 2000 merupakan tindak lanjut dari Dialog Nasional

---

<sup>5</sup> Agus A Alua, *Jalan sejarah, jalan kebenaran Seri pendidikan politik Papua no 3* ;(Jayapura Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro penelitian STFT Fajar Timur 2002 )

<sup>6</sup> Ibid h9

<sup>7</sup> Ibid h 10

Tahun 1996 yang tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah pusat. Beberapa isu hangat menjelang Kongres II Papua adalah Proklamasi Kemerdekaan Papua dan pembentukan Pemerintah peralihan (Transisi).<sup>8</sup> Sejak itu pekik kemerdekaan Bangsa Papua terus berkumandang diseluruh Papua, masyarakat non Papua (amber)<sup>9</sup> menjadi takut dan terancam serta ada yang memilih meninggalkan Papua (Tahun 2000) setelah terjadi beberapa peristiwa yang menegangkan baik itu di Wamena dan diberbagai daerah di Papua,ada yang memilih menetap di Papua namun tetap siaga sampai pada kemungkinan yang buruk.

Menyikapi gerakan dan tuntutan politik masyarakat Papua, pemerintah pusat melakukan operasi dan pengkondisian wilayah dan pengembangan jaringan komunikasi, dengan tujuan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Papua dan sekaligus melakukan upaya diplomasi untuk mendapatkan dukungan politis dari dunia internasional atas kedaulatan dan integritas NKRI.<sup>10</sup> Sementara kebijakan pemerintah Propinsi Papua adalah dengan memaksakan pelaksana kebijakan otonomi khusus (OTSUS) bagi Propinsi Papua, yang menimbulkan berbagai aksi protes dan berbuntut pada jatuhnya korban di pihak rakyat.<sup>11</sup> Kontradiksi Otonomi dan Merdeka semakin mencuat, mereka yang Pro Otonomi diwakili oleh Pemerintah Propinsi dan pimpinan Muspida lainnya sementara yang pro merdeka diwakili dengan Presidium Dewan Papua serta masyarakat adat Papua.

J P Salossa<sup>12</sup> dalam pernyataannya di Gereja Kemah Injil jemaat Rehobot Dok VII menilai bahwa masih banyak masyarakat Papua yang terbelakang. Menurutnya pemberlakuan Otonomi Khusus merupakan jalan terbaik agar masyarakat Papua merasa dihargai. OTSUS

---

<sup>8</sup> Agus A Alua; *Seri pendidikan politik Papua No 3 ; Marilah kita meluruskan sejarah PapuaBarat* ; (Jayapura Presidium dewan Papua dan Biro penelitian STFT Fajar Timur 2002)

<sup>9</sup>Kata Amber adalah bahasa daerah Papua yaitu dari daerah Biak yang mempunyai arti orang yang datang dari luar / pendatang; / Tuan.

<sup>10</sup> Mark rumbiak Arwam; *Ketika Ideologi sebuah Bangsa tiba di Persimpangan*“ Penculikan dan Pembunuhan Teys H Eluay suatu bentuk tindak kejahatan di Papua” ( Jogyakarta, 2003 ) h208

<sup>11</sup> Ibid h 209.

<sup>12</sup>Agus Alua, *Memoria Passionis di Papua; kondisi sosial politik dan Hak Asasi Manusia 2001*; ( Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura dan Lembaga Study Pers dan Pembangunan, thn 2003) h 7

sebagai 'pintu emas' menuju kemakmuran. Beberapa pihak yang pro mengatakan bahwa OTSUS merupakan salah satu strategi masyarakat Papua untuk mencapai kemerdekaan, perjuangan tanpa strategi sangat sulit mencapai tujuan. Perjuangan Pemerintah Papua untuk kebijakan OTSUS akhirnya mendapat persetujuan dari Pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-undang OTSUS nomor 21 Tahun 2001, yang diberlakukan secara resmi di Papua pada tanggal 01 Januari 2002, undang-undang tersebut merupakan jalan tengah bagi berbagai kelompok untuk sejenak meredakan konflik demi kepentingan yang lebih luas. Bagi Pemerintah Indonesia merupakan solusi dalam mengatasi konflik di Papua. Cita-cita dan harapan dalam Otsus Papua berusaha menghadirkan suatu bentuk pemulihan kondisi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua, terutama bagi kehidupan orang asli di Papua. Frans A Wospakrik mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia (RI) membuat kontrak pembangunan yang baru bagi rakyat di Papua untuk mengakhiri konflik dan memulai suatu era baru bagi rakyat Papua dalam rangka membangun Indonesia baru yang akan datang.<sup>13</sup> Menurut Agus Sumule otonomi khusus Papua dapat digunakan sebagai suatu cara untuk menampung dan mengolah aspirasi masyarakat Papua dalam konteks sistim hukum Republik Indonesia, dan dapat dipandang sebagai jawaban damai yang paling tersedia saat ini terhadap hubungan antagonis sebagai besar orang Papua dengan pemerintah pusat RI,<sup>14</sup> hal ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang (UU) No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menyatakan bahwa Otsus Papua merupakan langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah di Propinsi Papua.<sup>15</sup> Melalui rekapan peristiwa seputar pemberlakuan dan pelaksanaan Otsus di Tahun 2002, nampaknya apa yang memberi angin

---

<sup>13</sup> Frans A Wospakrik ( kata pengantar ) dalam Agus Sumule ( editor ), *mencari jalan tengah otonomi khusus Propinsi Papua*, ( Jakarta : Gramedia, 2003 )

<sup>14</sup> Ibid h10

<sup>15</sup> Ibid h41

segar kepada masyarakat Papua, penerapan Otsus yang mengusung kesejahteraan dan mengangkat hak dan martabat orang asli Papua menjadi tema dominan dalam kehidupan masyarakat Papua, namun kesegaran itu mulai pudar di awal tahun 2003.

Awan hitam tebal muncul ketika Pemerintah pusat mewujudkan pemekaran wilayah Papua, baik ditingkat Kabupaten dan Propinsi yang memberi dampak yang kurang diharapkan. Kebijakan itu dianggap telah mengagalkan pelaksanaan Otsus, dan memecah-belah masyarakat Papua yang kemudian memicu konflik dimana-mana.<sup>16</sup> Kondisi kesejahteraan masyarakat juga berisi catatan kelam mengenai pesatnya tingkat penyebaran penyakit HIV-AIDS yang mematikan dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat yang memicu adanya isu 'genosida' di Papua.<sup>17</sup> Penanggulangan secara medis tidak tertangani dengan baik, atau perilaku sosial tidak terkontrol sangat mungkin virus mematikan ini menyebar kepada kalangan yang lebih luas lagi.

Gambaran tentang tingginya angka pengangguran menjadi ironis ditengah terbukanya berbagai peluang dibidang informal (sektor wiraswasta) yang ditungjang oleh dana Otsus yang begitu melimpah, selain itu kualitas sistim pendidikan yang tidak menyiapkan lulusannya dengan sejumlah kahlian dan ketrampilan untuk membantu menciptakan lapangan kerja sendiri, ikut menyumbang tingginya angka pengangguran di Papua.

Berbagai gejala dalam masyarakat Papua belum berhenti, pro dan kontra soal Otsus semakin meruncing. Sebagian orang menganggap Otsus merupakan cara terbaik dalam memecahkan persoalan separatis di Papua dalam hal ini diwakili oleh pihak Pemerintah (Pemerintah Daerah Papua) dan pihak-pihak lain yang mendukung, sebagian orang menganggap pemenuhan harapan kesejahteraan dan pemulihan bagi orang asli Papua dirasa belum maksimal dan Otsus merupakan produk Jakarta yang harus ditolak. Mereka meragukan niat baik

---

<sup>16</sup> Theo van de Broek dkk, *dalam Memoria passionis di Papua " kondisi sosial politik dan Hak Asasi manusia 2002-2003*( Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura bersama Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2004 ) h2

<sup>17</sup> Ibid h 4

Pemerintah pusat yang tidak memecahkan semua persoalan di Papua. Dalam hal ini diwakili pihak Dewan Adat Papua maupun pihak Presidium Dewan Papua. Tanggapan yang lebih keras menyatakan bahwa kebijakan otonomi khusus adalah tindakan “setengah hati” dari pihak Jakarta (pusat) untuk meredam kemarahan masyarakat Papua, tetapi justru memupuk kemarahan dan sedang menunggu saat yang tepat untuk meledak. Tanggapan senada dinyatakan dalam tulisan yang mengatakan bahwa kebijakan otonomi khusus merupakan kebaikan hati, rasa cinta dan kebijakan Jakarta demi kelangsungan hidup masyarakat Papua, dengan tujuan sebenarnya yakni sebuah penjajahan yang sungguh halus. Inilah sebagian gambaran mengenai kontroversi yang berlangsung dalam pelaksanaan Otsus. John Djopari (Ketua Tim Evaluasi Otonomi Khusus Depdagri) Thaha Alhamid (sekjen Presidium Dewan Papua), Hana Hikoyabi (Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua) dalam Kompas Ekspedisi Tanah Papua (2007) menyatakan ragu akan keseriusan Pemerintah, baik di Pusat maupun di Papua sendiri dalam membangun Papua. Menurut Djopari, meski kebijakan otonomi khusus cukup menjanjikan pengembangan manusia dan daerah Papua, cairnya anggaran otonomi khusus yang jumlahnya triliunan rupiah setiap tahun tidak pernah sesuai dengan jadwal yang sesungguhnya. Akibatnya, muncul istilah uang beli uang. Artinya pemerintah daerah datang ke Jakarta membawa uang untuk orang-orang tertentu di Pusat dengan harapan Pemerintah pusat segera mengeluarkan anggaran otonomi khusus yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah. Apakah ini bukan pembangunan setengah hati?<sup>18</sup> Alhamid mempertanyakan munculnya inpres nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan. Padahal, sumber daya manusia di daerah ini belum siap menghadapi itu semua. Kalau berbagai kebijakan tersebut dijalankan, akhirnya yang mengenyam pembangunan di Papua hanya para pendatang atau pejabat-pejabat daerah tertentu. Rakyat tidak mendapat apa-apa. Lain halnya dengan Hana Hikoyaby, menurutnya, Pemerintah tidak pernah menunjukkan keseriusan dalam membangun Papua yang luasnya sekitar tiga kali pulau Jawa. Majelis Rakyat Papua yang diharapkan berperan dalam memberdayakan orang asli

---

<sup>18</sup> Gasper Liauw *The Papua paradox*( Ani Jogjakarta Tahun 2010), h 67

Papua pun tidak diberi kewenangan yang berarti.<sup>19</sup> Tanggapan yang senada juga dikatakan oleh Alex Rumaseb bahwa OTSUS Papua masih saja buram.<sup>20</sup> Tidak pernah ada kejelasan tentang grand design OTSUS Papua. Kebijakan yang muncul setelah Otsus justru membuat jalan pencapaian Otsus semakin jauh. Terakhir, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan PapuaBarat (UP4B) yang dikirim sebagai upaya pendekatan kesejahteraan bagi penyelesaian persoalan Papua. Jika benar demikian, mengapa kepala UP4B seorang Jendral? Selain itu setiap ada persoalan di Papua, mengapa Menkopolkam, Kapolri dan BIN yang dikirim datang di Papua? Mengapa bukan Menkokesra, Mendiknasbud, atau Menkes? Hal ini menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan di Papua.

Tanggapan-tanggapan keras yang ditujukan terhadap kebijakan Otsus tersebut, menunjukkan bahwa ada problem tak terselesaikan (*unfinished problem*) dibalik dikeluarkannya kebijakan Otsus bagi Papua. Masyarakat menilai bahwa problem tak terselesaikan, khususnya dimasa sebelum Otsus. Dewasa ini perlawanan rakyat Papua semakin terorganisir secara damai melalui Presidium Dewan Papua (PDP) yang mengedepankan prinsip-prinsip perjuangan damai.<sup>21</sup> Persoalan HAM di Papua sangat terkait erat dengan konflik antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia yang tak terselesaikan, maka kekuatiran semua pihak tentang akan terus terjadinya pelanggaran HAM di Papua tak bisa dihindari, '*Unfinished problem*' inilah yang justru tidak boleh diabaikan, tetapi harus digumuli dengan konsisten oleh pemerintah dan dicari tahu secara mendalam, yang harus didukung oleh semua pihak sebelum dikeluarkannya kebijakan Otonomi Khusus sehingga tidak terkesan terburu-buru dan akhirnya banyak menuai penolakan dari masyarakat. Ditengah pro kontra kebijakan UU Otonomi Khusus, antara pemerintah daerah maupun dengan sebagian masyarakat yang menyatakan penolakan dan salah satunya diwakili oleh Dewan Adat Papua, korban utama kontroversi ini adalah masyarakat Papua sendiri. Dalam arti, kontroversi ini merupakan pergolakan politik, konflik politik yang

---

<sup>19</sup> Ibid h 70

<sup>20</sup> Alex Rumaseb *Ironi Papua* (Jayapura Tahun 2013) h 7

<sup>21</sup> John Rumbiak *Ketika Ideologi*, (Jogyakarta, 2003) h 67

menempatkan masyarakat sebagai imbas atas perdebatan yang terjadi. Kontroversi politik ini menimbulkan suasana ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat. Kehidupan bersama menjadi tidak lagi seimbang, lunturnya penghormatan pada institusi pemerintah oleh sebagian masyarakat, lingkungan hidup dipenuhi ketakutan akan kemungkinan serangan dan demo dari masyarakat yang menolak keputusan pemerintah, saling curiga antar masyarakat yang mendukung otonomi dan yang menolak otonomi, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya kestabilan politis tidak seutuhnya nyata dalam kehidupan masyarakat. Di dalam kondisi ketidakstabilan akibat kontroversi otonomi khusus terkait dengan konsep dan implementasinya, tanggung jawab tiap oknum maupun tiap lembaga dalam masyarakat tersebut untuk mengembalikan kestabilan dan kedamaian di tengah konteks hidup masyarakat Papua. Melihat sikap kritis rakyat terhadap otonomi khusus merupakan bagian dari kesadaran rakyat Papua bahwa otonomi khusus adalah milik mereka dan rakyat ingin berperan sebesar-besarnya dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Tanggung jawab tersebut selayaknya diemban tidak hanya oleh tiap anggota masyarakat di Papua, tetapi juga setiap lembaga masyarakat di Papua, termasuk lembaga-lembaga agama. Ada anggapan bahwa konflik dan peperangan bermula dari kesenjangan di berbagai bidang; politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, kesempatan, akses dan lain-lain, dan agama harus muncul sebagai unsur ideologis untuk mendukung dasar-dasar pemersatu dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, sepatutnya pertanyaan disampaikan kepada Gereja tentang peran dan fungsi apakah yang dapat dilakukan gereja dalam rangka tanggungjawabnya dibidang politik? Harus disadari bahwa gereja adalah institusi yang dihargai dan dihormati, dihadirkan oleh Allah didalam “dunia” untuk menjalani panggilan dan pengutusannya sebagai alat karya penyelamatan Allah. Dunia yang dimaksudkan adalah dunia dimana Allah memanggil, mengumpul, dan mengorganisir orang-orang percaya. Menurut P.D.Latuihamalo.

“Jadi adanya gereja dalam masyarakat merupakan tindakan Allah.”<sup>22</sup> Artinya bahwa tindakan-tindakan Gereja didalam dunia ini adalah panggilan dan pengutusan Allah demi untuk kebenaran yang Allah percayakan kepadanya. Dan kebenaran itu meliputi seluruh segi kehidupan termasuk politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian gereja harus tampil dengan cirinya sendiri yang Tuhan berikan kepadanya tentang kebenaran yang membentuk manusia dalam aktifitasnya disegala bidang kemasyarakatan, Gereja harus memberikam kesaksian dan pelayanan setiap hari tentang kebenaran tersebut pada segala tataran hidup. Atas dasar itu, maka Gereja dapat menyatakan kepada Negara, supaya bertindak adil, memanfaatkan kekuasaan secara bertanggung jawab demi kebenaran ilahi.<sup>23</sup> Hal ini juga dikatakan oleh mantan Ketua Sinode (periode 1971-1977) W Maloali<sup>24</sup> bahwa posisi Gereja (GKI-TP) pada masa ini serba dilematis karena terjepit oleh arus politik Gerakan Papua Merdeka yang semakin meningkat. Hampir sebagian besar warga gereja larut dalam pemikiran politik yang berlangsung, oleh karena itu Gereja tidak boleh tertinggal dalam hal ini, gereja harus berkiprah secara komprehensif Gereja hadir bukan saja untuk dirinya sendiri atau memperhatikan hal-hal teologis tapi juga memperhatikan masalah-masalah sosial politik dan berpihak kepada keadilan serta berani menyuarakan suara kenabiahannya.

Peran apa yang mampu ditunjukkan oleh pihak gereja di Papua? Pada titik ini, bukan dipermasalahan benar tidaknya otonomi khusus, tetapi bagaimana peran gereja sebagai duta Kristus di tengah pergolakan ini? Gereja sebagai duta Kristus yang mewarnai setiap kebijakan strategis pada era Otsus ini. Walaupun Gereja tidak mempunyai program politik, tetapi melalui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat gereja harus melayani dengan menekankan prinsip-prinsip Kristen dalam kehidupan sosial masyarakat, memperhatikan kemajuan manusia, bekerja demi nilai-nilai Kerajaan Allah. Dalam melayani masyarakat Gereja dituntut untuk membangun dengan cinta kasih, adil, dan damai dengan memberi penghormatan dan

---

<sup>22</sup>PDLatuihamolo Artikel ‘*Beberapa catatan tentang relasi Gereja dan Negara*’ [www.leimena.org/en/page/v/428](http://www.leimena.org/en/page/v/428)

<sup>23</sup>Ibid h 3

<sup>24</sup>Gabriel Maniagasi, *Mengenal para ketua sinode GKI di TP*, ( Yayasan Emereuw Sentani Jayapura 2012)h,21

keberpihakan pada kaum lemah. Untuk itu keterlibatan Gereja sangat diperlukan sebagai lembaga yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat Papua, dan Gereja perlu memikirkan teologi semacam apa yang perlu diusung? Dari fenomena yang muncul bahwa aksi penolakan Otsus menunjukkan bahwa Masyarakat menginginkan “kemerdekaan”, hal yang senada ketika menerima dan memberlakukan OTSUS menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan suatu pembangunan yang “memerdekakan” mereka dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Yewangoe, katakan bahwa politik sangat penting untuk menentukan siapakah atau apakah manusia itu, dan politik berpengaruh bagi kehidupan manusia sehingga tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan agama.<sup>25</sup> Dalam setiap kebudayaan agama menjadi unsur sangat penting terhadap politik. Oleh Karena itu sebagai Gereja perlu menginterpretasikan makna politik dengan bertolak dari kerangka acuan moral atau teologi, dan didalam terang ini, persoalan-persoalan politik tertentu didekati Sebab baik Negara dan Gereja mempunyai tujuan pegabdian yang sama yaitu “manusia.”

Berangkat dari realitas politik di Papua yang menghendaki adanya suatu “kebebasan” maka hendaknya gereja di Papua belajar dari teologi yang diusung dan yang dikembangkan oleh Gustavo Gutierrez di Amerika Latin, yaitu “Teologi Pembebasan“. Alasannya sederhana saja karena penekanan Teologi pembebasan Gutierrez adalah refleksi kritis dalam terang sabda Allah atas praksis hidup orang Kristen, yang ikut melibatkan diri dari usaha pembebasan.<sup>26</sup> Hal pertama yang harus ada ialah praksis orang Kristen, teologi merupakan langka kedua. Teologi merupakan usaha untuk menemukan Roh Kudus yang telah hadir dalam dan menjiwai praksis Gereja. Karenanya praksis Gereja tidak merupakan kesimpulan yang diambil dari pemikiran teologi, tetapi merupakan *locus Theologicus*.<sup>27</sup> Selain Gutierrez pemikiran dan kontribusi teolog pembebasan Asia Aloysius Pieris dalam teologinya yang mengajak untuk menerima rasa Asia, dan menjadi rujukan dalam kerangka teoritis tesis ini, mengingatkan bahwa di Papua juga muncul

---

<sup>25</sup>John Campbell, dkk, *Teologia Politik*, ( Yayasan Oase Intim,2013 ), h 95

<sup>26</sup>ASuryawasita,SJ, *Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez*, ( Jogyakarta: Jendela,2001 )h, 8

<sup>27</sup>Ibid h 10

suatu gerakan-gerakan politik pembebasan yang sesuai dengan konteks budaya setempat. Pieris juga menerapkan teologi pemerdekaan yang menuntut partisipasi dinamis dalam perjuangan kemanusiaan demi mengikuti Kristus secara dinamis.<sup>28</sup> Pieris memunculkan ide dimana Yesus digambarkan sebagai “Guru Asia“ yang dengan sikap kemiskinan-Nya telah mengumpulkan kaum miskin disekitar diri-Nya menjadi suatu umat Allah yang berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya.<sup>29</sup> Pemikiran para teolog Pembebasan ini hendaknya memberikan pemikiran pengembangan Teologi gereja di Papua

Bertolak dari paparan yang menjelaskan kondisi realitas politik Papua dan pergumulan hidup masyarakat Papua, dan ditengah kontroversi otonomi khusus serta harapan bagi gereja untuk mendukung terciptanya perdamaian, maka dibutuhkan suatu penelitian yang mendalam berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang hendak dilakukan dalam penelitian ini. Sejumlah problema dan masalah, mendorong untuk sampai padapertanyaan penelitian atau *research question*. Bagaimana perspektif Gerejawi (GKI-TP) tentang politik yang berkaitan dengan integrasi dan Otonomi Khusus di Papua?

## B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang menjadi obyek dari penelitian ialah:

1. Bagaimana perspektif Gereja terhadap politik pembebasan di Papua dan Bagaimana konsep Teologi yang di gunakan oleh GKI-TP?

## C. BATASAN MASALAH

Penulis membatasi permasalahan ini dalam konteks organisasi Persekutuan Gereja yaitu: Gereja Krsiten Injili di Tanah Papua ( GKI –TP) Dengan harapan mendapat gambaran lebih utuh yakni tentang prespektif Gerejawi tentang politik Papua.

---

<sup>28</sup>Aloysius Pieris SJ, *Berteologi dalam konteks Asia*, ( Jogyakarta; Kanisius, 1996 ) h 138

<sup>29</sup>Ibid h 47

#### D. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perspektif Gerejawi (Gereja Kristen Injili di Tanah Papua) tentang politik di Papua.
2. Memberi sumbangan pemikiran tentang konsep Teologi Politik bagi GKI Di Tanah Papua.

#### E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penulis menganggap bahwa hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memperkaya pengembangan dan memperluas cakrawala pengetahuan Teologi pembebasan di Tanah Papua.
2. Secara praktis, Penelitian ini memberi sumbangan pemikiran bagi Gereja, serta rujukan terhadap Teologi politik di Tanah Papua sebagai bentuk tanggung jawab gereja dalam politik.

#### F. JUDUL

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan judul untuk penelitian Tesis ini yaitu: **“Membangun Jembatan Teologi antara Integrasi dan Otonomi Khusus Papua”** dengan sub judul: Suatu kajian tentang perspektif Gerejawi (Gereja Kristen Injili di Tanah Papua) dalam Politik Papua.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung di Jayapura. Dalam hal ini lokasi penelitian akan berhubungan dengan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI – TP)

### 2. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan dimensi deskriptif. Metode penelitian dengan dimensi deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Metode ini pun berusaha menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

### 3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada dua (2) sumber utama, yaitu hasil wawancara dan dokumen-dokumen atau studi kepustakaan yang terkait dengan persoalan penelitian serta didukung dengan hasil observasi peneliti.<sup>31</sup>

#### a Teknik wawancara

Informan dipilih secara sengaja didasarkan atas pertimbangan keterlibatan dan relasi yang bersangkutan dengan persoalan dan tujuan penelitian, yang dalam hal ini adalah perwakilan gereja, serta intelektual yang berhubungan dengan persoalan ini. Dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang dipilih adalah mereka yang berkedudukan dan memiliki pengaruh penting dalam organisasi yang mereka bawahi atau bernaung di dalamnya.

Wawancara ini pun akan dilakukan secara terbuka, dengan terlebih dahulu mempersiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan terbuka.

---

<sup>30</sup> Suprayogo, Imam & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h 136-137

<sup>31</sup> Stephen Cole, *The Sociological Method* (Chicago : Markham Publishing Company, 1972) 40-41 menyebutkan dan menjelaskan bahwa terdapat tiga basis sumber data kualitatif, yaitu documents, in-depth-interviews and personal observation

b Teknik studi dokumen

Teknik ini digunakan untuk melakukan studi atau analisa historis, yaitu usaha mengungkapkan dan mendeskripsikan apayang terjadi atau berlangsung dimasa lalu melalui pelacakan berbagai rekaman dan laporan.<sup>32</sup>Penulis mencari data-data dokumenter kelembagaan.

4. JENIS DATA

Jenis Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dalam penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data berupa literatur, dokumen-dokumen Gereja seperti keputusan – keputusan Sidang Sinode yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sedangkan data sekunder didapat dari observasi dan wawancara kepada pimpinan Gereja dan tokoh Gereja yang dikategorikan sebagai informan kunci.

H. SISTIMATIKA PENULISAN

Bab I memaparkan tentang latar belakang yang menjadi alasan penelitian hingga Perumusan masalah dan pertanyaan penelitian (research question), dilanjutkan dengan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode yang digunakan dan sistematika dari penulisan.

Bab II membahas tentang Analisis Hasil Penelitian.

Bab III membahas tentang Teologi Pembebasan di Amerika Latin dan di Asia (Gutierrez dan Aloysius Pieris)

Bab IV Membahas Tentang Teologi Pembebasan diPapua: Integrasi dan Otonomi Khusus.

Bab V sebagai penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi dari tulisan ini

---

<sup>32</sup>Marshal, Catherine & Crethchen B Rossman, *Designing Qualitative Research* (California : Sage Publication, 1985), h 95-96

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

GKI-TP merupakan suatu dimensi sosial masyarakat yang secara institusional menjadi pelaku dan saksi sejarah perjalanan politik Papua. Bahkan secara khusus dalam momentum dua peristiwa politik besar integrasi (Pepera) dan bergulirnya Undang-undang Otonomi Khusus. Gereja yang dalam hal ini secara signifikan berperan serta memberi sumbangan pemahaman teologisnya terhadap situasi-situasi politik yang terjadi terkesan berpihak kepada otoritas dominasi di satu sisi namun pro-rakyat di sisi lain.

Penelitian dan kajian memberi gambaran kepada kita bahwa perspektif Gereja dalam politik Papua menunjukkan sikap kehati-hatian dan terkesan suatu realitas sikap abu-abu. Gereja yang seharusnya memberi suara kenabian ditengah pergolakkan malah sepi, tak terdengar. Sikap yang demikian konvensional lahir dari suatu kecenderungan berteologi secara tradisional, yang menganggap bahwa Politik itu kotor, tabu, dan bukan ranahnya Gereja. Perspektif yang sempit akan mempengaruhi sikap dan tindakan Gereja yang kaku dan enggan masuk dalam ranah politik.

Meskipun seperti disebutkan penulis bahwa, secara fungsional gereja hadir dan turut menderita bersama dengan penderitaan umat. Hal ini terlihat dari beberapa rumusan hasil persidangan Gereja yang mengkritisi tentang kejahatan manusia berlangsung sepanjang sejarah Papua dalam NKRI dimana berbuah pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan orang, penangkapan sewenang-wenang dan pemenjaraan serta berbagai intimidasi dan pemaksaan kehendak melalui pendekatan keamanan dengan menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM).

Beranjak dari pengalaman GKI TP dan Papua sebagai lokus pemberitaan Injilnya, suatu paradigma yang berbeda dikerjakan oleh para teolog dunia ketiga sebagaimana telah penulis uraikan pada bab tiga tulisan ini. Gutierrez dan Pieris dalam konteks pemberitaan firman yang kurang lebih sama baik di Amerika Latin maupun Asia mengemukakan suatu perspektif berteologi yang lebih berpihak kepada umat dan kemanusiaan. Gutierrez dalam pemikirannya mengungkapkan pentingnya suatu sikap kontemplasi dalam berteologi yang berakar pada praksis dalam aksi. Suatu keputusan gereja untuk berpihak terhadap kenyataan penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kesengsaraan yang dialami oleh umat. Dengan demikian suatu praksis dalam aksi memungkinkan gereja berteologi bukan dari apa yang terjadi pada konteks alkitabiah dan keyahudiaan yang menjiwai penulisannya melainkan berelevansi dengan kenyataan umat masa kini dalam pergulatan penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan yang juga menjadi ciri utama dari konteks negara-negara dunia ketiga. Selanjutnya apa yang dikemukakan Gutierrez ini senada dan sinkron dengan pendapat Pieris tentang pentingnya suatu revolusi eklesiologis sebagai suatu usaha berteologi yang mengembalikan Yesus dan pergerakannya secara original menjadi milik umat dalam konteksnya, dan bukan menjadi sesuatu yang asing. Upaya yang demikian membutuhkan suatu penguatan di aras basis, demikianlah Pieris menyarankan pentingnya suatu wadah bagi usaha berteologi yang berpihak kepada kemanusiaan sebagaimana menjadi pergumulan sehari-hari umat, yakni suatu komunitas basis yang beraras kepada jemaat dan teologi awamnya yang lahir dari pengalaman sehari-harinya. Keterbukaan berteologi dari aras komunitas basis membuat gereja peka dan realistis memahami persoalan-persoalan teologis yang sejatinya menjadi tanggung-jawab pelayanan gereja di tengah-tengah dunia ini.

Dari sanalah penulis melihat dua hal dasar yang penting yang dapat menjadi relevansi dasar bagi suatu perspektif gereja tentang politik pembebasan di Papua. Mengingat bahwa perjalanan politik bangsa ini akan menjadi sangat panjang ke depan dan gereja akan terus menjadi suatu

dimensi yang signifikan memberi pengaruh bagi perjalanan pelayanan gereja. Demikianlah gereja harus berevolusi secara eklesiologis maupun teologis untuk lebih berkontemplasi secara praksis dalam aksi dan serius membangun kekuatan komunitas basis untuk memungkinkan lahirnya suatu pengalaman-pengalaman berteologi yang membuka wawasan teologis gereja untuk tanggap, kritis, dan proaktif terhadap kenyataan-kenyataan sosial-politik yang terjadi di sekitarnya.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan mulai dari Bab I hingga Bab IV ini, maka penulis melihat beberapa hal yang sekiranya dapat menjadi perhatian bagi usaha-usaha berteologi GKI TP di masa depan, secara khusus dalam rangka membangun perspektifnya terhadap politik pembebasan yang senantiasa bergejolak di Papua diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu ada ketegasan untuk merekonstruksi ulang konsep teologis terhadap masalah politis. Hal ini penting karena masalah politis (kemerdekaan) sama dengan masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Masalah kemerdekaan bukanlah suatu yang berdiri sendiri melainkan sesuatu yang selalu berada dalam tindakan Allah bagi manusia. Dengan demikian kemerdekaan adalah persoalan teologis karena terkait langsung dengan harkat, martabat dan kehidupan manusia sebagai umat Tuhan. Dan untuk memperoleh kemerdekaan maka sangat membutuhkan kualitas kehidupan yang benar dihadapan Allah. Untuk itu rekomendasi penulis bagi GKI-TP adalah konsep atau metode yang ditawarkan oleh Gutierrez adalah berteologi dari praksis. Sebagaimana penulis uraikan dalam Bab 4, Berteologi dari praksis adalah salah satu cara atau metode pendekatan yang dipakai oleh Teologi Pembebasan yang berpangkal pada pengalaman riil jemaat. Metode ini menunjukkan keaslian Gereja yang diutus dalam dunia, setiap manusia tanpa kecuali adalah Bait Allah. Akibatnya, kita dapat bertemu Allah di dalam perjumpaan kita dengan manusia, khususnya di dalam orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas dan diberlakukan tidak adil. Metode ini akan membawa Gereja untuk melihat masalah-masalah

2. Perlu ada ketegasan dalam konsep teologis terhadap masalah kemanusiaan. Sebagaimana yang penulis sampaikan bahwa secara fungsional GKI-TP telah hadir ikut merasakan penderitaan bersama dengan umat. Hal ini berkaitan dengan semangat kemerdekaan di Papua, maka disitu ada masalah pelanggaran HAM yang serius terutama menyangkut masalah ketidakadilan secara struktural yang mengakibatkan pemiskinan, pembodohan, pembiaran, perampasan dan juga kejahatan. Hal ini perlu disikapi dan ditindaklanjuti secara professional bukan sekedar wacana, atau himbauan yang kosong. Atau bukan saja memperkuat struktur organisasi dengan mengahdirkan Komisi Keadilan dan Keutuhan Penciptaan (KPKC). Tetapi juga penguatan komunitas diakar rumput sangat perlu. Penulis melihat bahwa sumbagsih dari Gutierrez dan Pieris untuk Gereja yaitu memberi penguatan pada komunitas basis Gereja atau dikenal di GKI-TP dengan Kelompok Sel Pemuridan (KSP) adalah sesuatu yang relevan. Dalam KSP bukan saja terjadi suatu persekutuan yang berbicara tentang Tuhan, tetapi persekutuanyang bertindak dan melakukan secara bersama-sama sebagai wujud dari pewartaan Firman Tuhan. Dengan demikian bahwa adanya komunitas basis akan melibatkan atau mengikutsertakan warga Gereja peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

## B. SARAN USUL

1. Kepada Sinode GKI di Tanah Papua kiranya dapat memberi ketegasan untuk merekonstruksi ulang konsep Teologi yang sesuai dan relevan dalam perkembangan zaman

dengan isu-isu yang aktual dalam jemaat. Dengan merubah paradigma misalnya dari teologi tradisional ke teologi pembebasan yang relevan sesuai dengan konteks dimana Gereja itu hadir.

2. Kepada Departemen Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua untuk secara aktif dan proaktif merancang suatu program pembinaan jemaat yang sifatnya menguatkan komunitas basis umat dalam rangka membangun sikap revolusi eklesiologis yang beraras dari jemaat itu sendiri. Misalnya dalam hal ini penguatan KSP (Kelompok Sel Pemuridan) yang sudah berjalan sebagai bagian dari model pelayanan pengembalaan umat pada beberapa klasis lingkungan sinode GKI TP. Dengan materi sesuai dengan isu-isu yang relevan dan kontekstual
3. Kepada Departemen Pendidikan dan Teologi Sinode GKI di Tanah Papua untuk serius memperhatikan penguatan wacana-wacana teologi kontekstual dan wawasan-wawasan seperti teologi pembebasan, teologi feminis, teologi ekologi, teologi politik yang relevan dengan konteks berteologi di Papua.
4. Kepada Jemaat-jemaat GKI-TP untuk konsisten dalam kelompok sel pemuridan (KSP) dengan mempertajam materi-materi yang aktual dengan masalah yang dihadapi oleh Jemaat serta melakukan tindakan-tindakan nyata yang menjawab pergumulan umat dalam lingkungan dimana ia ada dan beraktivitas, sehingga menjadi pewartaan Firman yang hidup di lingkungan dimana ia berada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J Daniel, *Teologi Lintas Budaya Refleksi Barat di Asia*, ( Jakarta BPK-GM,1992)
- Alua, A Agus, *Jalan sejarah, jalan kebenaran Seri pendidikan politik Papua no 3* ; (Jayapura Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro penelitian STFT Fajar Timur 2002 )  
-----*Marilah kita meluruskan sejarah Papua Barat* ; *Seri pendidikan politik Papua No 3* (Jayapura Presidium dewan Papua dan Biro penelitian STFT Fajar Timur 2002)  
-----*Memoria Passionis di Papua; kondisi sosial politik dan Hak Asasi Manusia 2001*; Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura dan Lembaga Study Pers dan Pembangunan, thn 2003.
- Arwam, Rumbiak Mark, *Ketika Ideologi sebuah Bangsa tiba di Persimpangan* ( Jogyakarta, 2003 )
- Campbell, Jhon, *Teologia Politik*, ( Yayasan Oase Intim,2013 ).
- Catherina, Marshal & Rossman B, *Designing Qualitative Research* (California : Sage Publication, 1985),
- Chang, William, *Berteologi Pembebasan*, ( Jakarta, Obor 2005 )
- Chen, Martin, *Teologi Gustavo Gutierrez refleksi dari praksis kaum miskin*, Jogyakarta, kanisius 2002.
- Cole, Stephen, *The Sociological Method* (Chicago : Markham Publishing Company, 1972).
- De Broek, Theo, *Memoria passionis di Papua “ kondisi sosial politik dan Hak Asasi manusia 2002-2003* Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura bersama Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Griapon, A, *Manifesto Politik Komite Nasional papua Risalah Perdebatan di Nieuw Guinea Raad*, (Jayapura, Tabura 2007 )
- Ho Matius, *Gereja dan Pemberdayaan Warga, dalam Teologi Politik John Campbell-Nelson dkk.* (Makasar Yayasan Oasis Thn 2013 )
- Kolimon, Mery L Y, *Tugas Gereja dalam penguatan Masyarakat sipil, dalam Teologi Politik John Campbell-Nelson dkk.* ( Makasar, Yayasan Oase Intim,2013)
- Liauw, Gasper, *The Papua paradox* Ani Jogyakarta Tahun 2010.
- Lowy, Michael, *Teologi pembebasan*, ( Yogyakarta, Inssist Press,1999 )
- Maniagasi, Gabriel, *Mengenal para ketua sinode GKI di TP*, ( Yayasan emereuw Sentani Jayapura 2012).
- Margana, A, *Komunitas basis Gerak mengereja kontekstual*, Jogyakarta Kanisius 2004.
- Nitiprawiro, Wahono, *Teologi Pembebasan sejarah, metode, praksis dan isinya.* (Jakarta, Pustaka sinar harapan, 1987)
- Pekei, Titus, *Gus Dur Guru Papua*, Jakarta, PT suara harapan bangsa, 2014.
- Pieris, Aloysius, *Berteologi dalam konteks Asia*. (Yogyakarta, Kanisius 1999)
- Purwatma, Matheus, *Berteologi cara asia* dalam seri pastoral 424 Pusat pastoral Yogyakarta

Th.2012 N0. 1&2

- Rubianto, Vitus, *Paradigma Asia pertautan kemiskinan dan kereligiusan dalam teologi Pieris*,  
Jogyakarta Kanisius, 2001.**
- Rumaseb, Alex, *Ironi Papua* ( Jayapura, Pelita Tahun 2013 )**
- Rumbiak, John, *Ketika Ideologi sebuah Bangsa tiba di Persimpangan*“ Potret Hak Asasi  
Manusia di Papua “ ( Jogyakarta, 2003 )**
- Sihombing, Mangasi, *Aspek Hukum keberadaan Irian/papua dalam RI dan isu-isu terkait*.  
(Jakarta, Departemen LN,2005)**
- Sumihe, Sostenes, *50 Tahun GKI Di Tanah Papua: Pelajaran Dari Perspektif Eklesiologi*, GKI  
Di Tanah Papua (Jayapura: 2006)**
- Suprayogo, Imam & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* ( Bandung : PT Remaja  
Rosdakarya, 2003)**
- Suryawasita, A, SJ, *Teologi Pembebasan Gustavo Gutierrez*, ( Jogyakarta: Jendela,2001 )**
- Tebay, Neles, *Agama-agama asli Papua, dalam Spiritualitas dialog*, editor A Eddy Kristiyanto,  
( Yogyakarta, Kanisius 2010 )**
- Wospakrik, A Frans, *Mencari jalan tengah otonomi khusus Propinsi Papua*, ( Jakarta :  
Gramedia, 2003 )**
- Yewangoe, A, *Misiologi berhadapan dengan teologi pembebasan* Dalam seri pastoral 281  
(yogyakarta,Pusat pastoral, 1997 )**

#### **Dokumen Gereja,**

- Hasil Keputusan Oyehe – Sidang BPL GKI Papua,23-30 Mei 1976
- Buku Tata Gereja GKI-TP, ( BP Am Sinode GKI – Tahun 2002 )
- Buku Peraturan tentang Jemaat,Klasis,Sinode dan uraian tugasnya, ( BP  
Am Sinode – Tahun 2002 )
- Buku Hasil Sidang Sinode XIV GKI-TP Sorong 2000
- Buku Hasil Sidang Sinode XV GKI-TP Wamena 2006
- Buku Hasil Sidang Sinode XVI GKI-TP Sentani 2011

#### **Tesis,Makalah,Majalah, Web site.**

- Doirebo, Elimelek, *Keterlibatan GKI dalam turut menentukan kebijakan politik di Papua*.  
( SalatigaTesis UKSW 2003)**
- Erari, Karel Ph, *Upaya Menemukan Identitas Berteologia* , (Dok: 20/KM-P/GKI/1985)**
- Menemukan wajah Yesus dalam Budaya Papua*, Di undo dari  
<http://wartapapua1.blogspot.com/2012/10/yesus-dalam-perspektif-budaya>**
- Foreri, *Semangat kemerdekaan Papua Barat dan DOM di Irianjaya*. Makalah disampaikan  
dalam seminar Rekonsiliasi Nasional dan Otonomi daerah, ( Jayapura, FORERI,**

1998 ).

**Hetheridge, Jhon Bishop, *Indonesian Human Rights abuses in West papua/irianjaya Documents***

**Latuhamalo, P D, *Beberapa catatan tentang relasi Gereja dan Negara***'[http: www leimena org/en/page/v/428](http://www.leimena.org/en/page/v/428)

**Maniagasi, Frans, *Masa depan papua*, Tempo**, 18 Juni 2000

**Masmada, Renny, *Pra sejarah Bangsa*** di undoh dalam <http://rennymasmada.wordpress.com>

**Mawene, Mth, *GKI di TP ditengah arus putaran politik suatu catatan sejarah. Artikel dalam Buletin SERIKAT*** ( jayapura, BPAS GKI, oktober 2001 )

----- ***Mengenal GKI di Tanah Papua ( sejarah, Organisasi, serta arti logo )*** di undoh dari Facebook, pada tanggal 25 oktober 2014.

----- ***Meluruskan yang telah dibengkokan Allah?*** Majalah Serikat, September 2001.

**Nanlohi, Bastian, *Analisis Kritis Wacana pluralisme dalam missi dan visi GKI-TP***, Tesis UKSW- Salatiga thn 2009.

**Natalia, *Evaluasi kritis terhadap doktrin Gereja dari teologi pembebasan***. Dalam majalah teologi Veritas Oktober 2000.

**Pemerintah Propinsi Papua BIRO Hukum, *Sejarah kembalinya irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia ( Brosur ) Tahun 1980***.

**Sumihe, Sostenes, *Teologi persekutuan dan implemenatasinya dalam GKI-TP***. Dibawakan dalam Konsultasi Teologi II GKI-TP di Klasis Paniai Nabire Tahun 2013.

**Suryawan, I Ngurah, *Jiwa yang patah ingatan kekerasan dan penderitaan di Tanah Papua***, Majalah Eletronik Ethnohistory, di undoh pada <http://ethnohistory> edisional study Indonesia timur yang terlupakan. Pada tanggal 05 Oktober 2014.